

MEMPROMOSIKAN INFRASTRUKTUR UNTUK SEMUA ORANG

Peningkatan infrastruktur haruslah bermanfaat bagi semua orang, termasuk para perempuan dan penyandang disabilitas.



GENDER

Konteks Kebijakan Indonesia



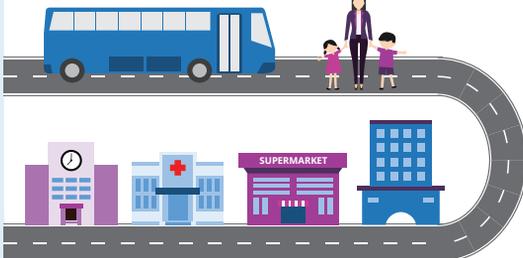
Pemerintah Indonesia mengamanatkan kesetaraan gender melalui Inpres No.9/2000, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan peraturan-peraturan di tingkat daerah.

Fakta - Indonesia

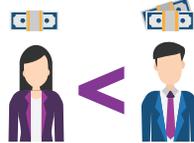
Indonesia mendapat peringkat ke-**84** dari 144 negara untuk kesetaraan gender (World Economic Forum, 2017).



Perempuan menggunakan transportasi dalam menjalankan berbagai perannya seperti mengantar anak-anak atau tanggungan lainnya ke sekolah dan klinik kesehatan, berbelanja, dan bekerja (AIPEG Study, 2017).



Perempuan mendapatkan upah **29%** lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan ini paling banyak terjadi pada pekerja dengan upah rendah (World Economic Forum, 2017).



Peningkatan kualitas fasilitas air dan sanitasi memberikan manfaat kepada perempuan dan anak-anak melalui perbaikan akses, kualitas dan privasi (DFAT Watson Hibah, 2017).



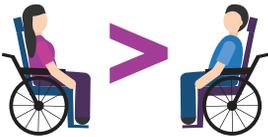
Konteks Kebijakan Indonesia



Pemerintah Indonesia mengamankan disabilitas melalui Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-undang No.19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Fakta - Indonesia

Angka disabilitas pada perempuan lebih tinggi, sebesar **13%** untuk perempuan dibandingkan **9%** untuk laki-laki (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014).



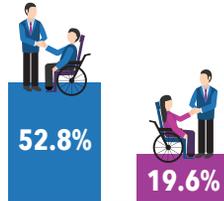
Sebagian besar transportasi umum dan bangunan **tidak dapat diakses oleh para penyandang disabilitas** (JICA, 2015).



Penyandang disabilitas lebih banyak tinggal di daerah pedalaman (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014).



52,8% laki-laki disabilitas dan **19,6%** perempuan disabilitas bekerja dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas (WHO dan World Bank 2011).



Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial (GESI)

Memahami Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial membantu memastikan bahwa semua orang mendapat manfaat dari infrastruktur, terlepas dari gender, disabilitas, etnik, status sosial ekonomi, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya.



Pelibatan Masyarakat Sipil (CSE)

Pelibatan Masyarakat Sipil dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur lebih efektif, responsif, transparan, dan akuntabel.



Visi dan Misi

Kebijakan Infrastruktur Indonesia, perencanaan dan pelaksanaannya memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.



Mendukung partisipasi yang efektif dari perempuan, penyandang disabilitas dan anggota masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur.

Pendekatan Twin-Track

beberapa kegiatan akan menargetkan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial yang spesifik

Kegiatan GESI yang spesifik

Kegiatan pengarusutamaan GESI

Elemen GESI akan diperhatikan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan KIIAT

KIIAT akan mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial di dalam pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pendekatan twin-track tersebut.



Bantuan hibah akan disediakan untuk Organisasi Masyarakat Sipil untuk menjawab permasalahan GESI.



&



Informasi lebih lanjut tersedia di situs www.kiat.or.id

MEMPROMOSIKAN INFRASTRUKTUR UNTUK SEMUA ORANG

Peningkatan infrastruktur haruslah bermanfaat bagi semua orang, termasuk para perempuan dan penyandang disabilitas.



GENDER

Konteks Kebijakan Indonesia

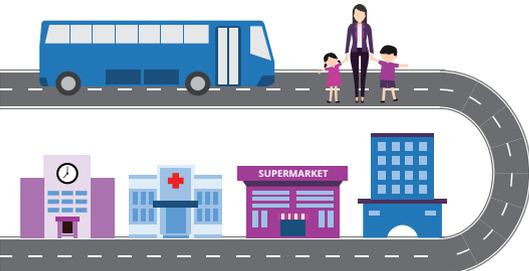
Pemerintah Indonesia mengamanatkan kesetaraan gender melalui Inpres No.9/2000, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan peraturan-peraturan di tingkat daerah.

Fakta - Indonesia

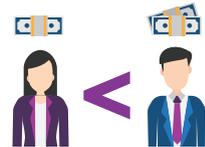
Indonesia mendapat peringkat ke-84 dari 144 negara untuk kesetaraan gender (World Economic Forum, 2017).



Perempuan menggunakan transportasi dalam menjalankan berbagai perannya seperti mengantar anak-anak atau tanggungan lainnya ke sekolah dan klinik kesehatan, berbelanja, dan bekerja (AIPEG Study, 2017).



Perempuan mendapatkan upah 29% lebih rendah daripada laki-laki. Kesenjangan ini paling banyak terjadi pada pekerja dengan upah rendah (World Economic Forum, 2017).



Peningkatan kualitas fasilitas air dan sanitasi memberikan manfaat kepada perempuan dan anak-anak melalui perbaikan akses, kualitas dan privasi (DFAT Watsan Hibah, 2017).



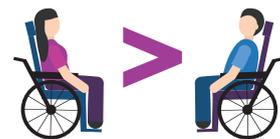
DISABILITAS

Konteks Kebijakan Indonesia

Pemerintah Indonesia mengamanatkan disabilitas melalui Undang-undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-undang No.19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Fakta - Indonesia

Angka disabilitas pada perempuan lebih tinggi, sebesar 13% untuk perempuan dibandingkan 9% untuk laki-laki (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014).



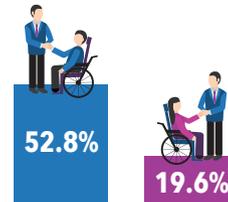
Sebagian besar transportasi umum dan bangunan tidak dapat diakses oleh para penyandang disabilitas (JICA, 2015).



Penyandang disabilitas lebih banyak tinggal di daerah pedalaman (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014).



52,8% laki-laki disabilitas dan 19,6% perempuan disabilitas bekerja dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas (WHO dan World Bank 2011).



Kesetaraan Gender & Inklusi Sosial (GESI)

Memahami Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial membantu memastikan bahwa semua orang mendapat manfaat dari infrastruktur, terlepas dari gender, disabilitas, etnik, status sosial ekonomi, jenis kelamin, atau perbedaan lainnya.



Pelibatan Masyarakat Sipil (CSE)

Pelibatan Masyarakat Sipil dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur lebih efektif, responsif, transparan, dan akuntabel.



Visi dan Misi

Kebijakan Infrastruktur Indonesia, perencanaan dan pelaksanaannya memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.



Mendukung partisipasi yang efektif dari perempuan, penyandang disabilitas dan anggota masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur.

Pendekatan Twin-Track

beberapa kegiatan akan menargetkan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial yang spesifik

Kegiatan GESI yang spesifik

Kegiatan pengarusutamaan GESI

Elemen GESI akan diperhatikan dalam perencanaan dan implementasi kegiatan Kiat

Kiat akan mempromosikan kesetaraan gender dan inklusi sosial di dalam pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pendekatan twin-track tersebut.



Bantuan hibah akan disediakan untuk Organisasi Masyarakat Sipil untuk menjawab permasalahan GESI.



Informasi lebih lanjut tersedia di situs www.kiat.or.id